

## ■ PENGANTAR REDAKSI

Program MAMPU mendukung para anggota parlemen perempuan dan laki-laki yang memiliki komitmen terhadap kesetaraan gender dan peningkatan taraf hidup perempuan miskin dan marjinal, serta kaukus-kaukus parlemen yang terkait isu MAMPU untuk memperjuangkan reformasi pemerintah dari dalam agar menghasilkan kebijakan yang lebih berpihak pada penghapusan kemiskinan.

Program MAMPU memandang hubungan dengan para anggota parlemen dan kaukus perempuan parlemen, terutama di tingkat kabupaten/kota, sebagai pintu masuk ideal dalam meningkatkan kesadaran dan tindakan nyata menuju reformasi kebijakan yang berdampak langsung kepada perempuan miskin di Indonesia.

Atas dasar itulah, MAMPU mengadakan Konferensi Nasional Perempuan Inspirasi Perubahan: Peran Anggota Legislatif dalam Penghapusan Pemiskinan Perempuan di Indonesia.

Konferensi ini bertujuan untuk membangun komitmen bersama para peserta (anggota DPR, DPD, DPRD RI terpilih 2014-2019, mitra MAMPU, perwakilan instansi-instansi pemerintahan RI dan pemangku kepentingan lainnya) untuk meningkatkan taraf kehidupan perempuan di Indonesia dengan langkah-langkah nyata.

Semoga newsletter Edisi 1 ini dapat menyajikan poin-poin penting selama konferensi yang dapat dijadikan agenda bersama untuk bersinergi dengan berbagai pihak dalam upaya pengentasan kemiskinan bagi perempuan di Indonesia. ■



## Konferensi Nasional Perempuan Inspirasi Perubahan

# KOMITMEN BERSAMA UNTUK PEREMPUAN INDONESIA

**INDEKS PEMBANGUNAN** gender dan indeks pembangunan manusia serta indikator lainnya menunjukkan bahwa pembangunan secara umum memang telah mengalami kemajuan yang signifikan. Namun, tantangan yang dihadapi perempuan berkaitan dengan kedudukan, fungsi, dan peran mereka, justru masih berat sehingga membutuhkan perhatian semua pihak.

"Perlu menjadi perhatian untuk dilihat lebih dalam penyebabnya supaya dapat dilakukan perbaikan ke depan," kata Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago pada Konferensi Nasional Perempuan Inspirasi Perubahan di Ruang Nusantara IV, Komplek MPR/DPR RI Senayan, Rabu (20/5).

Farouk Muhammad, Wakil I Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mengatakan, rekrutmen politik di Indonesia masih prosedural, belum substansial, sehingga membuat jumlah perempuan di parlemen tidak terlalu signifikan.

"Ini tantangan terbesar bagi perempuan, khususnya yang duduk di legislatif dalam memperjuangkan hak-hak politik perempuan dan pembangunan berkeadilan dan sensitif gender," ujarnya.

Konferensi juga mengangkat peran

legislator dalam reformasi kebijakan untuk penghapusan pemiskinan perempuan. Hadir sebagai narasumber dalam *talkshow* yang dipandu Rosianna Silalahi antara lain Mercy Barends (Anggota Komisi VII DPR-RI), Irma Suryani Chaniago (Anggota DPR-RI), Eva Sundari (mantan anggota DPR RI), Masruchah (Komisioner Komnas Perempuan), Maria Ulfah (Sekjen ALIMAT), Nia Dinata (Sutradara, Kalyana Shira), Zumrotin K.Susilo (Ketua Yayasan Kesehatan Perempuan), Rocky Gerung (Dosen FIB UI), dan lain-lain.

Masing-masing pembicara membahas beragam persoalan terkait perempuan, seperti kekerasan seksual, kesehatan seksual dan reproduksi, dan standar pelayanan minimum yang belum efektif untuk perlindungan dan pemenuhan hak korban dari perspektif keluarga, politik, dan filsafat.

Konferensi Nasional yang mengusung tema "Peran Anggota Legislatif dalam Penghapusan Pemiskinan Perempuan di Indonesia" itu bertujuan untuk membangun komitmen bersama para peserta guna meningkatkan taraf kehidupan perempuan di Indonesia dengan langkah-langkah nyata. ■

## MAMPU

Maju Perempuan Indonesia  
untuk Penanggulangan Kemiskinan



# PERLINDUNGAN SOSIAL UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN

**DALAM BEBERAPA** tahun terakhir, target penerima manfaat perlindungan sosial bertambah. Jika sebelum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, penerima target perlindungan tersebut adalah individu atau rumah tangga miskin, maka pada RPJMN 2015-2019 target penerimanya lebih luas, mencakup kelompok rentan, yaitu masyarakat adat, disabilitas, petani, nelayan, pekerja informal, penyandang masalah kesejahteraan sosial, lansia, dan ibu rumah tangga.

"Sayangnya, meskipun perempuan miskin tahu adanya program perling-

an sosial dan jaminan kesehatan, namun siapa saja yang berhak menerima bantuan tersebut tidak tahu. Ini karena program perlindungan sosial dianggap sebagai kebijakan nasional sehingga sangat sentralistik," kata Dian Kartika Sari dari Koalisi Perempuan Indonesia dalam Konferensi Nasional Perempuan Inspirasi Perubahan di Gedung Nusantara IV Komplek MPR/DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (20/5).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Koalisi Perempuan Indonesia, Dian mengatakan, tidak semua perempuan yang pada akhirnya mendapat perlindungan sosial bisa

keluar dari kemiskinan. "Artinya, program perlindungan sosial akan berhasil jika disertai adanya program pemberdayaan sosial," ujarnya.

Sementara itu, Nani Zulminarni dari Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) mengusulkan pentingnya melakukan pemutakhiran data tentang kriteria kemiskinan dan mengajak masyarakat terlibat dalam program perlindungan sosial secara riil. "Peran pemangku amanah termasuk lembaga legislatif juga dibutuhkan untuk melakukan pengawasan dan penganggaran," katanya. ■

## KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BUTUH PERLINDUNGAN NEGARA

**PEREMPUAN KORBAN** kekerasan seksual semakin meningkat. Data Komnas Perempuan tahun 2012 menyebutkan bahwa sebanyak 35 perempuan Indonesia telah menjadi korban kekerasan seksual setiap hari. Sayangnya, kasus atau isu kekerasan seksual justru sering dilekatkan dengan masalah moral. Korban kekerasan malah tidak ditolong.

Demikian diungkapkan Desti Murdijana dari Forum Pengada Layanan dalam sesi diskusi "Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual" dalam Konferensi Nasional Perempuan Inspirasi Perubahan di Jakarta, Rabu (20/5).

Menurut Desti, pemerintah sebenarnya memiliki Pusat Pelayanan Terpadu dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Namun jika diamati lebih jeli, katanya, pelayanan ini tidak sebanding dengan korban kekerasan seksual. Selain itu, masih ada kekurangan lainnya seperti minimnya anggaran, kapasitas pendamping yang masih rendah, dan tidak optimalnya mekanisme koordinasi.

Nia Dinata menuturkan bahwa film merupakan alat yang ampuh untuk melakukan perubahan sosial. Film adalah sumber inspi-



rasi yang bisa membuka wacana baru bagi publik. Termasuk untuk mengubah cara berpikir tentang perempuan.

Anggota DPR RI Komisi VIII Arzeti Bilbina menambahkan, perempuan parlemen terus selalu mendorong agar permasalahan perempuan dapat diselesaikan salah satunya dengan memperkuat peraturan dan perundangan yang pro-perempuan. "Tapi itu bukan semata tanggung jawab perempuan, melainkan juga tanggung jawab negara," kata Arzeti. ■

# KPP-RI KEMBALI KE SEMANGAT AWAL

**KEPENGURUSAN KAUKUS** Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP RI) periode 2015-2019 baru saja dilantik pada April 2015 silam. Kepengurusan periode ini mencanangkan kembali ke semangat awal sebagai wadah komunikasi dan konsolidasi parlemen perempuan dalam mengawal agenda advokasi bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya.

“Untuk lebih mensinergikan, KPP-RI periode ini juga menggabungkan



anggotanya yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD),” ujar Melani Leimena Suharli, Presidium KPP-RI di Jakarta, Rabu (20/5).

Menurut Melani, penggabungan ini diharapkan akan menjadikan KPP-RI menjadi semakin kuat. Berkaca pada periode sebelumnya, KPP-DPR dan DPD itu berdiri sendiri-sendiri, sehingga menimbulkan kesan terpecah. Dengan

adanya penggabungan DPR dan DPD ini, tentu akan lebih sinergi.

Melani mengakui masih banyak “pekerjaan rumah” yang harus dikerjakan pada periode ini. Misalnya saja, meningkatkan kualitas komunikasi politik perempuan parlemen, memperkuat jejaring antarperempuan parlemen, sehingga satu sama lain dapat saling mendukung, serta meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. ■

# TIGA MERANGKAI SINERGI

**ANGGOTA PARLEMEN** perempuan, organisasi masyarakat sipil, dan media merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Lena Maryana Mukti, mantan anggota DPR RI Komisi VIII masih ingat betul saat Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 214 UU Nomor 10 Tahun 2008 mengenai Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mengancam kebijakan afirmatif untuk perempuan melalui kuota 30 persen di parlemen.

“Saat itu, anggota parlemen, organisasi masyarakat sipil, dan media bergerak bersama-sama mengupayakan berbagai strategi untuk meningkatkan keterwakilan



perempuan di parlemen. Perempuan di lembaga pembuat kebijakan memang harus bersinergi dengan organisasi masyarakat sipil dan media,” kata Lena saat sesi diskusi pada Konferensi Nasional Perempuan Inspirasi Perubahan di Jakarta, Kamis (21/5). “Advokasi dengan organisasi masyarakat sipil dan dukungan media sangatlah penting.”

Dalam kesempatan yang sama, wartawan senior Maria Hartiningsih mengakui jika media massa memang memiliki kekuatan keempat (*fourth estate*).

Sementara untuk membangun hubungan dengan media juga tidak sukar. “Anggota parlemen dapat membangun kepercayaan dengan media yang didasari dengan kesetaraan, dengan cara memberikan informasi yang benar, tidak memperlakukan wartawan sebagai ‘tukang catat’ saja, dan tidak memberikan uang,” ujarnya.

Sesi diskusi yang dimoderatori Dwi Anggia, presenter dari TVOne itu juga menampilkan Caroline Tupamahu dari BaKTI. Menurut Caroline, membangun komunikasi antar anggota parlemen perempuan dan media memang sangat penting. Untuk itu, BaKTI berupaya menjembatani keduanya dengan membangun forum media. Forum Media adalah forum antara media, masyarakat sipil, parlemen untuk mendorong penguatan sinergi berbagai pihak guna meningkatkan wacana publik dan mendukung 5 isu perempuan dan kemiskinan yang diusung oleh program MAMPU. ■

## MAMPU

Maju Perempuan Indonesia  
untuk Penanggulangan Kemiskinan

# BUKAN SEKADAR PAMERAN

**BISA DIBAYANGKAN** bagaimana sulitnya bila tidak ada air bersih dan listrik. Tidak ingin kondisi tersebut terus berlarut-larut, Kopernik terpanggil untuk memasarkan teknologi tepat guna, di antaranya saringan air, kompor biomassa, dan lampu tenaga surya, dengan menggandeng 150 ibu-ibu di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.

Putu Monica Christy, *Senior Program Officer* Kopernik mengatakan, selama ini persoalan listrik dan air bersih masih membelit kehidupan warga di dua provinsi tersebut. "Kami berharap produk-produk teknologi tersebut mampu



Inspirasi Perubahan.

Selain Kopernik, ada Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) yang menampilkan produk tenun karya mama-mama di NTT yang tergabung dalam Gerakan Tenun-koe. Gerakan ini merupakan gerakan pemberdayaan perempuan miskin, tidak



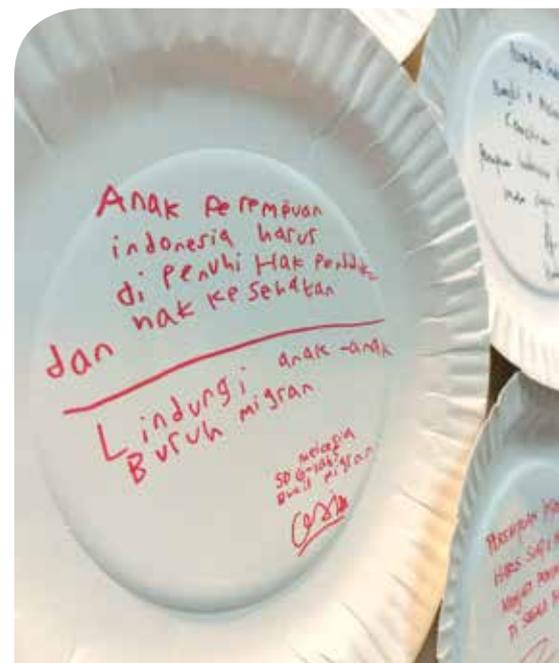
Kopernik

menjawab kebutuhan masyarakat akan listrik, air, sekaligus mengajak masyarakat untuk tidak lagi menebang pohon ketika mereka membutuhkan ranting kayu untuk memasak," ujarnya sambil menambahkan harga tiga produk tersebut terjangkau, antara Rp 200 – Rp 300 ribu.

Ketiga teknologi tersebut dipamerkan di selasar Gedung Nusantara IV Kompleks MPR/DPR RI, selama dua hari, Rabu-Kamis (20-21/5), bertepatan dengan acara Konferensi Nasional Perempuan

mempunyai sumber pendapatan tetap, tingkat pendidikan yang masih rendah, kesehatan dan pemenuhan gizi yang masih jauh dari ideal, serta tidak mempunyai kapasitas menyuarakan hak-haknya.

Total ada 15 peserta yang ikut pameran, terdiri dari mitra-mitra dan relasi MAMPU. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai wadah untuk mensosialisasikan program-program pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh mitra-mitra MAMPU sesuai dengan temanya masing-masing



kepada tamu undangan yang hadir.

Pameran yang berlangsung di acara konferensi nasional itu memang bukanlah sekadar pameran. Di booth MAMPU, misalnya. Para pengunjung diberikan kesempatan menuliskan harapannya kepada para perempuan Indonesia di sebuah piring kertas. Walhasil, ratusan harapan mengalir kepada perempuan Indonesia. Dan perempuan Indonesia kiranya mampu pula mewujudkan harapan mereka. ■

# KARYA SUARA HATI



© Kresnawati Teri/Maret 2015/MAMPU/PhotoVoice



© Dara/Maret 2015/MAMPU/PhotoVoice



© Peji/Maret 2015/MAMPU/PhotoVoice



**SEBUAH** foto mewakili seribu kata. Ungkapan lama itu rasanya benar saat melihat foto yang dipamerkan di Gedung Nusantara IV Komplek MPR/DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (20/5). Setiap foto seakan mampu bercerita dan menorehkan kisah yang berbeda. Pameran foto yang digelar selama 2 hari itu memang bukanlah pameran biasa. Itu adalah *PhotoVoice* tentang buruh migran Indonesia. *PhotoVoice* menyuarakan isu lewat foto/gambar, memberikan suara bagi perempuan terpinggirkan. Foto yang menunjukkan bagaimana isu-isu terkait buruh migran berpengaruh terhadap kehidupan mereka dan komunitasnya. Foto tersebut menggambarkan proses mulai dari sebelum keberangkatan sampai kepulangan.

Bahkan foto-foto tersebut bukanlah hasil karya para fotografer profesional melainkan hasil jepretan 24 perempuan

mantan dan keluarga buruh migran. Sebelumnya, mereka telah mengikuti lokakarya *PhotoVoice* pada Maret 2015 silam yang diselenggarakan MAMPU bersama Migrant CARE dan mitra-mitra lokal mereka, yaitu Perkumpulan Panca Karsa dan Yayasan Kesehatan untuk Semua.

Perempuan-perempuan yang dipilih untuk mengikuti lokakarya berasal dari 3 desa di Lombok, Nusa Tenggara Barat dan 3 desa di Lembata, Nusa Tenggara Timur.

Dalam lokakarya itu, masyarakat dibekali pengetahuan bagaimana cara menggunakan kamera digital, dasar-dasar fotografi, dan cara untuk memanfaatkan fotografi sebagai alat untuk menyuarakan dan memperdengarkan isu-isu yang berdampak dalam kehidupan mereka dengan menuliskannya ke dalam keterangan foto (*photo caption*). Na-

mun yang terutama, mereka diberikan wawasan agar dapat menghasilkan karya foto yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Hasilnya, foto yang ditampilkan benar-benar muncul sebagai karya suara hati. Hasil karya mereka juga dapat dijadikan sebagai media advokasi dan komunikasi tentang isu yang diangkat.

Bagi MAMPU sendiri, *photoVoice* merupakan salah satu alat untuk pemantauan dan evaluasi. Kegiatan ini akan diadakan ulang dalam jangka waktu sekitar 6 bulan untuk melihat apakah ada perubahan yang berarti di desa tempat tinggal buruh migran dan keluarganya. Pendampingan ini akan berlangsung selama 1 tahun. Setelah itu, mereka harus konsisten melakukan kegiatan *photoVoice* sendiri, sehingga ke depannya diharapkan mereka dapat memantau dan mengevaluasi perkembangan desanya sendiri. ■

## MAMPU

Maju Perempuan Indonesia  
untuk Penanggulangan Kemiskinan



**Mercy Barends**, Anggota Komisi VII DPR  
dari Fraksi PDIP

**TANTANGAN YANG** kami hadapi soal pola pikir bahwa isu gender jangan direduksi sebatas isu perempuan dan anak. Di parlemen kita juga menghadapi sistem yang sangat patriarki dan hirarki birokratis, karena itu perempuan parlemen butuh militansi untuk memperjuangkan isu yang diangkat, salah satunya tentang pemiskinan perempuan.

Isu ini sendiri memiliki perspektif luas dari sisi hak kewarganegaraan, perlakuan yang sama di depan hukum, hak memperoleh keadilan dan kebenaran, pendidikan, dan sebagainya. Agar persoalan-persoalan perempuan terjawab di parlemen kita mengatur kemasannya agar kaum laki-laki juga mau bersuara untuk kita sehingga mereka akan menganggap bahwa isu perempuan bagian dari isu bersama.



**Agatha Retnosari**, Anggota DPRD Provinsi  
Jawa Timur, Komisi E dari Fraksi PDIP

**KAMI SUDAH** menjalankan beberapa program pemberdayaan perempuan pada anggaran tahun ini untuk mengatasi persoalan feminisasi kemiskinan di Surabaya. Kami memberikan pelatihan kepada perempuan-perempuan miskin yang menjadi kepala rumah tangga, perempuan-perempuan janda, perempuan-perempuan *single* supaya mereka bisa keluar dari garis kemiskinan mereka. Kami juga sedang menggodok Raperda Penanggulangan dan Penanganan HIV/AIDS.

Sebelumnya sudah ada Perda Penanggulangan dan Penanganan HIV/AIDS namun tidak berfungsi dan butuh direvisi. Saya berharap Perda Penanggulangan dan Penanganan HIV/AIDS yang baru nanti bisa berjalan sungguh-sungguh dan dirasakan oleh masyarakat yang ada di bawah, apalagi kasus HIV di Jawa Timur nomor dua se-Indonesia dan kasus AIDS-nya nomor satu se-Indonesia. Perda ini memang untuk umum tapi secara khusus akan melindungi perempuan.



**Tri Hastuti Nur R**, Ketua Lembaga  
Penelitian dan Pengembangan Pimpinan  
Pusat 'Aisyiyah

**SEJAK AWAL** berdiri, 'Aisyiyah memiliki komitmen terhadap berbagai problem kesehatan reproduksi dengan berbagai isu, seperti tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), meningkatnya angka HIV/AIDS di kalangan ibu rumah tangga, rendahnya layanan kesehatan reproduksi perempuan, dan minimnya anggaran pemerintah untuk kesehatan reproduksi. Bahkan anggaran kesehatan reproduksi perempuan tidak ada dalam APBN.

Layanan kesehatan reproduksi bagi perempuan adalah hak setiap perempuan. Tidak boleh satupun perempuan terenggut nyawanya karena melahirkan, terkena kanker leher rahim, kanker payudara maupun HIV/AIDS. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan layanan kesehatan reproduksi.

'Aisyiyah mendorong agar setiap layanan kesehatan dasar memiliki standar pelayanan minimum (SPM) dengan memberikan pelayanan tes IVA dan Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI) bagi perempuan agar terhindar kanker payudara dan kanker serviks.

## NEWSLETTER PEREMPUAN INSPIRASI PERUBAHAN

EDISI MENDATANG



- **Refleksi 3 Tahun Forum Mitra**  
Forum Mitra MAMPU telah berjalan tiga tahun. Kini telah memasuki tahun keempat. Sudah banyak capaian yang telah diraih, tentunya. Namun, masih ada tantangan ke depan yang mesti dihadapi dan dilalui. Rencana aksi pun dirumuskan dalam pertemuan "Bersama untuk Perempuan Indonesia" untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut.
- **Aplikasi Pembuka Akses Keterbukaan**  
Aplikasi digital yang mampu melakukan kontrol atas kebijakan dan layanan publik sampai menagih janji kampanye anggota dewan pada saat kampanye.
- **Merekam Lewat Gambar**  
Materi pembicara tidak hanya bisa terekam lewat kata-kata. Ilustrasi juga bisa menjadi media alternatif. Graphic recording menjadikannya gampang dicerna, sekaligus menarik.
- **Desti Murdijana (Forum Pengada Layanan), Anis Hidayah (Migrant CARE), dan Misiyah (KAPAL Perempuan)**  
Apa kata mereka tentang Forum Mitra MAMPU? Adakah harapan yang mereka sampaikan?